Nama : Teguh Agung Prabowo

NIM : 512121230007

Jurusan : Sistem Informasi

Mata Kuliah : E-Government (Pemerintahan Elektronik)

Tugas 4 Pemerintahan eletronik : Di negara berkembang, e-government dipandang hanya menguntungkan kelas menengah dan atas. Apakah Anda setuju? Jika ya, langkah apa yang perlu diambil untuk membangun penerapan e-government yang bersifat inklusif, merangkul semua populasi.

Jawab :

Proses perubahan dari model konvensional menjadi e-government tentu memiliki tantangan tersendiri apalagi untuk memulai. Seringkali pemerintah bingung harus memulai dari mana karena minimnya SDM dan SDA. Namun langkah awal harus segera ditempuh, misalnya dimulai dari penayangan potensi wisata daerah, informasi umum terkait pemerintahan (foto dan nama gubernur, alamat kantor dinas, dan lain-lain), dan informasi perniagaan misalnya harga cabai hari ini. Selain itu, informasi pendidikan juga tidak kalah penting untuk disampaikan seperti jam belajar, profil sekolah di kabupaten tertentu, dan informasi pendidikan lainnya.

Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-government menjadikan e-government sangat layak untuk diterapkan sebagai bentuk dukungan dari pengembangan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut 6 strategi pemerintah dalam penyusunan e-government:

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, serta terjangkau masyarakat luas. Hal tersebut salah satunya dicapai dengan pemerataan jaringan komunikasi baik wilayah maupun kualitasnya serta pembentukan portal informasi pemerintahan.
2. Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah otonom secara holistik. Maksudnya adalah persiapan SDM dalam pemerintahan agar beradaptasi dengan sistem yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Selain daripada penyajian informasi yang lengkap, keamanan transaksi layanan public juga menjadi hal utama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Peran dunia usaha cenderung kepada partisipasi dalam pemanfaatan e-government sehingga pelayanan public tidak sepenuhnya dilayani pemerintah.
5. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusiabaik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan peningkatan e-literacy masyarakat.
6. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistic dan terukur yaitu melalui tahapan persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan.